



Pengawasan Hewan Ternak Diperketat

• YULIANINGSIH

Kasus antraks di Kulonprogo diduga disebabkan lalu lintas perjalanan hewan ternak antar daerah.

YOGYAKARTA — Balai Besar Veteriner DIY meminta semua pemerintah daerah untuk melakukan pengetatan pengawasan lalu lintas hewan ternak di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk pengendalian kasus antraks yang belum lama ini ditemukan di Kulonprogo.

Epidemiologis Balai Besar Veteriner Wates DIY, Putut Djoko mengatakan, lalu lintas hewan ternak saat ini belum berjalan efektif. Menurutnya, masih ada oknum petugas yang hanya menarik retribusi tanpa melakukan pengecekan hewan ternak dan surat kelengkapannya.

"Padahal sesuai aturan untuk pengiriman hewan ternak harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) maupun uji laboratorium sesuai permintaan dari pembeli," ujarnya usai memberikan materi dalam sosialisasi penanganan antraks di Pemkot Yogyakarta, Rabu (1/2).

Bahkan menurutnya ada juga lalu lintas ternak yang melalui jalan tikus tanpa melalui *check point* petugas,

sehingga tidak terpantau dengan baik. Kondisi inilah yang menurutnya rawan masuknya hewan ternak yang sudah terkontaminasi antraks.

Untuk wilayah yang bukan termasuk wilayah peternakan, seperti di Kota Yogyakarta, pihaknya meminta untuk dilakukan pengawasan terhadap produk ternak. Termasuk untuk produk daging yang beredar harus sesuai mutu pengawasan. "Kalau sudah dalam bentuk daging potong lebih sulit diketahui," jelasnya.

Diakuinya, kasus antraks pada hewan ternak di Kulonprogo beberapa waktu lalu sudah terkonfirmasi kebenarannya. Tapi untuk penyebabnya masih ditelusuri. Diduga kasus antraks di Kulonprogo tersebut disebabkan lalu lintas perjalanan hewan ternak antar daerah.

Kasus antraks di Kulonprogo ditemui di Purwosari Girimulyo, menyerang pada satu sapi dan belasan kambing. Sebelumnya kasus antraks pernah juga ditemukan di wilayah Pakem, Sleman, pada 2003. Menurutnya saat itu antraks berasal dari kuburan sapi di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Mutu Komoditas dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Endang Viniarti, mengatakan masih ada hewan ternak yang diperjualbelikan tanpa mengantongi SKKH. Untuk itu pihaknya selalu berpesan pada jagal di Kota Yogya untuk memastikan kesehatan hewan ternak sebelum disem-

belih. Seperti memastikan hewan ternak tidak berasal dari endemis antraks. Termasuk memastikan hewan ternak yang akan disembelih masuk paling lambat pukul 18.00 WIB.

"Jadi sebelum paginya disembelih, masih ada waktu petugas mengecek, tapi sekarang sudah tidak ada yang berani ambil (hewan ternak) dari wilayah endemis, takut tidak laku," ujarnya.

Menurutnya, di Kota Yogyakarta terdapat dua kelompok peternak besar yaitu di Tegalrejo dan Kotagede. Total jumlah hewan ternak di sana sekitar 100 ekor. Dengan para peternak itu, Endang mengaku sudah memiliki jejaring melalui grup WhatsApp, yang selalu menginformasikan jika ada hewan ternak yang sakit.

Belum ditemukan antraks di Banjarnegara

Sementara itu, kasus ternak sapi yang terjangkit anthrax di Kulonprogo diperkirakan belum sampai menyebar ke daerah lain. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Dintankan) Banjarnegara, Jawa Tengah, Singgih Haryono, menyatakan belum ditemukan hewan ternak milik peternak yang terjangkit penyakit tersebut.

"Sejauh ini belum ada kasus antraks di Banjarnegara. Meski demikian, kami perlu lebih memperketat pemantauan lalu lintas ternak dari luar daerah, agar kasus-kasus tersebut

tidak sampai menyebar di daerah kami," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengintensifkan pengawasan kemungkinan adanya kasus antraks dengan melakukan sosialisasi pada para pedagang dan peternak di pasar hewan yang ada di Banjarnegara. Antara lain dengan memberikan pemahaman mengenai gejala-gejala hewan yang terjangkit antraks.

"Dengan pemahaman mengenai gejalanya, pedagang bisa menghindari pembelian ternak sapi yang terkena antraks untuk kemudian dijual ke luar daerah. Sehingga, adanya kasus antraks bisa dilokalisir," katanya.

Sementara itu, Pemkab Semarang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 1.800 dosis vaksin antraks. Selain itu, dinas pertanian mendapatkan 5.000 dosis vaksin antraks yang dibiayai dari APBN.

Pemanfaatan vaksin antraks ini bakal diprioritaskan untuk mengantisipasi potensi penyakit antraks di daerah endemis serta wilayah perbatasan Kabupaten Semarang dengan daerah lainnya. "Ada sedikitnya 6.800 ekor populasi sapi di kecamatan endemis dan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten/ kota lain," ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Semarang, Urip Triyoga.

Urip mengatakan pihaknya masih melakukan surveilans setiap tahun terhadap potensi penyakit antraks di wilayah Kecamatan Tengar.

■ eko widiatno/bowo pribadi ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005